



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)

**UNIT KERJA** : KEDEPUTIAN BIDANG Sarana dan Prasarana, dan Sistem

KOMUNIKASI Pencarian dan Pertolongan

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FAKHRIZET

2. Jabatan : DEPUTI BIDANG Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan

3. NHK : 796122

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.850.000.000

1. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI  
Rp. 1.800.000.000

2. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI  
Rp. 1.500.000.000

3. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI  
Rp. 1.550.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 380.000.000

1. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.  
80.000.000

2. MOBIL, TOYOTA YARIS PENUMPANG Tahun 2011, HASIL  
SENDIRI Rp. 50.000.000

3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2017, HASIL SENDIRI  
Rp. 250.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 25.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 73.351.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 5.328.351.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.328.351.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.